



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KOTA PONTIANAK

2025-2029



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka sebagai rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak menyusun Rencana Strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 s/d 2029.

Renstra adalah dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah yang memuat tentang visi, misi, arah dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan sesuai bidang dan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi masing- masing.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta memperhatikan isu-isu strategis yang kemudian diikuti dengan upaya pengembangan struktur, prosedur, operasionalisasi dan evaluasi serta berdasarkan masukan dan kebutuhan yang ada.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, yang terlibat dan memberikan masukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak.

Pontianak, September 2025

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	II-7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Stuktur	II-7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-12
2.3 Kinerja Pelayanan Disporapar	II-14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	II-33
2.5 Permasalahan Pelayanan	II-36
2.6 Penentuan Isu-isu Strategis	II-38
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. . .	III-46
3.1 Tujuan	III-46
3.2 Sasaran	III-47
3.3 Strategi Disporapar	III-48
3.4 Arah Kebijakan	III-49
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-55
4.1 Uraian Program	IV-55
4.2 Uraian Kegiatan	IV-65
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	IV-107
4.4 Uraian Sub Kegiatan Mendukung Prioritas Program Pembangunan Daerah	IV-129
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	IV-135
4.6 Target Keberhasilan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025-	

2029 melalui Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah
..... IV-137

BAB V PENUTUP V-138

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun renja perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Renstra DISPORAPAR berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (*oriented result*) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Renstra perangkat daerah, penyusunan diawali dengan Tahap Persiapan (pembentukan tim penyusun renstra, penyusunan agenda kerja tim Renstra, pengumpulan data dan informasi), orientasi Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra K/L dan Kabupaten/Kota, perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan, penyusunan rancangan Renstra,

pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra, pengesahan Renstra dan penetapan Renstra oleh Kepala Daerah. Renstra perangkat daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

DISPORAPAR sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, merupakan *leading* sektor program/kegiatan Kepemudaan, Keolahragaan dan kepariwisataan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembentukan karakter generasi muda, penguatan prestasi olahraga, serta pengembangan destinasi pariwisata yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dokumen Renstra DISPORAPAR merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DISPORAPAR, merupakan rencana pembangunan jangka menengah (Renstra) yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana awal Rencana Kerja (Renja) DISPORAPAR disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DISPORAPAR.

Indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota. Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dirumuskan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra DISPORAPAR Tahun 2025-2029 adalah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembinaan Olahraga Prestasi (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 15);

17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontinak Nomor 234);
19. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 7 tahun 2022 tentang pengembangan ekonomi kreatif (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 128);
23. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 16);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra DISPORAPAR Tahun 2025 – 2029 dapat memberikan arah pelaksanaan program kegiatan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025 – 2029. Adapun tujuan disusunnya Renstra DISPORAPAR Tahun 2025 – 2029, sebagai berikut;

- a. menjabarkan arahan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025 – 2029 ke dalam rencana strategis perangkat daerah;
- b. menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
- c. memberikan gambaran penyusunan strategi Perangkat Daerah, mengetahui kelemahan, kekuatan tantangan dan peluang Perangkat Daerah dalam pengembangan pelayanan sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V	PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

A. Tugas

DISPORAPAR mempunyai tugas membantu melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, DISPORAPAR mempunyai fungsi;

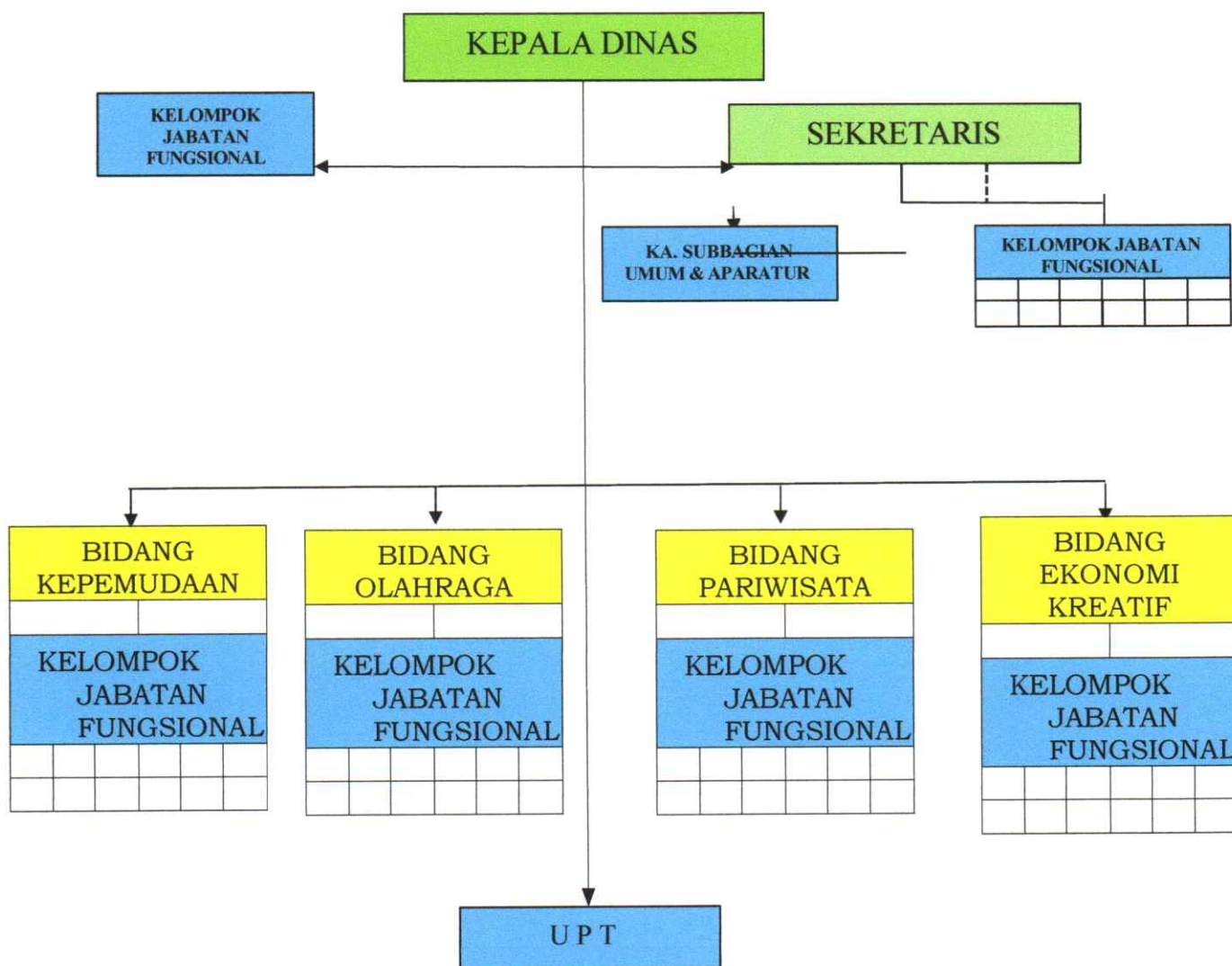
1. perumusan kebijakan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
2. pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
4. pelaksanaan administrasi dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

C. Struktur Organisasi

Berikut adalah Struktur Organisasi DISPORAPAR berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, terdiri dari.

II.1 Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kota Pontianak



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak

Berikut uraian tugas berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak.

1. Kepala Dinas

A. Tugas

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan program kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi ;

1. perumusan kebijakan teknis dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
2. perumusan rencana kerja dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
3. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
4. pengendalian dan pembinaan teknis dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata
5. penyelenggaraan perizinan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
6. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata; dan
7. pelaksanaan tugas lain dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang diberikan oleh Wali kota.

2. Sekretaris Dinas

A. Tugas

Sekretaris mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi;

1. perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
2. perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
4. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
5. pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
6. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
7. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
8. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Kepemudaan

A. Tugas

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang kepemudaan.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang kepemudaan mempunyai fungsi ;

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;
2. Perumusan program kerja dibidang kepemudaan;
3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan;
4. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang kepemudaan;
5. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemudaan;
6. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang kepemudaan;
7. pelaporan dan pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan;
8. pengelolaan administrasi dibidang kepemudaan; dan
9. pelaksanaan fungsi dibidang kepemudaan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Olahraga

A. Tugas

Bidang Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang olahraga.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi;

1. penyusunan kebijakan teknis dibidang olahraga;
2. perumusan program kerja dibidang olahraga;
3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang olahraga;
4. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang olahraga;
5. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang olahraga;
6. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang olahraga;
7. pelaporan dan pelaksanaan tugas dibidang olahraga;

8. pengelolaan administrasi dibidang olahraga; dan
9. pelaksanaan fungsi dibidang olahraga yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Pariwisata

A. Tugas

Bidang Pariwisata mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang kepariwisataan.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis dibidang pariwisata;
2. perumusan program kerja dibidang pariwisata;
3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pariwisata;
4. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang pariwisata;
5. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pariwisata;
6. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pariwisata;
7. pelaporan dan pelaksanaan tugas dibidang pariwisata;
8. pengelolaan administrasi dibidang pariwisata; dan
9. pelaksanaan fungsi dibidang pariwisata yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Bidang Ekonomi Kreatif

A. Tugas

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang ekonomi kreatif.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi ;

1. penyusunan kebijakan teknis dibidang ekonomi kreatif;
2. perumusan program kerja dibidang ekonomi kreatif;
3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang ekonomi kreatif
4. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang ekonomi kreatif;
5. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang ekonomi kreatif;

6. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang ekonomi kreatif;
7. pelaporan dan pelaksanaan tugas dibidang ekonomi kreatif;
8. pengelolaan administrasi dibidang ekonomi kreatif;
9. pelaksanaan fungsi dibidang ekonomi kreatif yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Kepegawaian berdasarkan eselon, selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

II.2 Tabel 2.1
Pegawai Berdasarkan Eselon

No	ESELON	JUMLAH
1	II	1
2	III a	1
3	III b	4
4	IV	1
		7

Sumber : Disporapar Kota Pontianak

Berdasarkan struktur organisasi Disporapar terdapat 7 Jabatan struktural, untuk data lengkap pejabat struktural yang ada pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak yaitu terdiri dari Kepala Dinas Eselon II ; Sekretaris Eselon III a, Kepala Bidang Kepemudaan, Kepala Bidang Olahraga, Kepala Bidang Pariwisata dan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Eselon III b, serta Kasubbag Umum dan Aparatur, Fungsional Adyatama, Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Adiyatama Kepariwisata & Ekraf, Analisis Kebijakan Ahli Muda, Pengelola Informasi Kepariwisata, Pengelola Usaha Kepariwisata, Pengelola Pencatatan Sarana dan Prasarana, Analis Kepemudaan, Kepariwisata Pengawas.

II.3 Tabel 2.2

Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat	16
2	Bidang Kepemudaan	4
3	Bidang Olahraga	8
4	Bidang Pariwisata	7
5	Bidang Ekonomi Kreatif	4
		39

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai terbanyak berada di Sekretariat, hal ini dikarenakan sekretariat terdiri dari tiga bidang, yaitu Kasubbag Umum dan Aparatur, Bidang Perencanaan dan Bidang Keuangan, sedangkan Bidang yang paling banyak memiliki staf adalah Bidang Sekretariat dan Olahraga, hal ini dikarenakan pada Bidang Olahraga memiliki tiga Seksi, yaitu Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Olahraga, dimana pada seksi ini selain melakukan pembinaan dan juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pengelolaan Tiket Masuk Kolam Renang Ampera, Sewa Gedung Gym, Sewa Lapangan Bola Koboen Sajoek, Sewa Lapangan Bola Halmahera, Sewa Lapangan Bola Ujung Pandang, Sewa Lapangan Bola Himalaya, Sewa Lapangan Bola Mentibu, Sewa Lapangan Tenis Halmahera dan Sewa GOR Bulu Tangkis.

Sedangkan jumlah pegawai paling sedikit ada pada Bidang Kepemudaan, dimana ada salah satu seksi yang hanya memiliki satu staf yaitu Kepala Seksi Penyadaraan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda.

II.4 Tabel 2.3
Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	6
2	Golongan III	30
3	Golongan II	3
		39

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak didominasi Golongan III sebanyak 30 orang, sedangkan golongan IV berjumlah 6 orang dan golongan II memiliki komposisi yaitu sebanyak 3 orang.

II.5 Tabel 2.4
Jumlah Pegawai menurut Latar Belakang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana	7
2	Sarjana	26
3	D3	5
5	SMA	1
		39

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa SDM yang dimiliki Disporapar memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, Pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan S1/Sarjana sebanyak 26 orang, Pegawai yang Pendidikan Pasca Sarjana sebanyak 6 orang, Pegawai yang memiliki Pendidikan Diploma paling sedikit sebanyak 5 orang dan Pegawai yang memiliki Pendidikan SMA sebanyak 1 orang.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Dengan demikian, Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak memiliki kewajiban dalam melaksanakan kinerja pelayanan di urusan kepemudaan, olaharaga dan pariwisata. Realisasi dari kinerja pelayanan tersebut diantaranya terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen

perencanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak pada dokumen Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2025-2029 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata beserta target indikator kinerjanya, dimana pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

- a. Nilai evaluasi Akip merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja Pemerintah dengan tujuan agar dapat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik. bila dilihat dari hasil penilaian LAKIP Tahun 2023, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak telah mencapai nilai BB (Sangat Baik) dengan nilai 78,06 hal tersebut dapat dikategorikan berhasil karena telah sesuai dengan target kinerja.
- b. Indikator Persentase Temuan yang ditindaklanjuti telah mencapai target kinerja setiap tahunnya yaitu 100%. hal ini dapat dikategorikan berhasil dikarenakan beberapa pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat, BPK, BPKP dan badan pengawasan lainnya dapat segera ditindaklanjuti.
- c. Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dapat dikategorikan berhasil pada tahun 2023 dengan nilai 84,659 kategori Sangat Baik, hal ini dikarenakan adanya upaya-upaya OPD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan percepatan waktu pelayanan terutama ditempat-tempat fasilitas umum seperti Kolam Renang Ampera, Lapangan Sepak Bola PSP, sesuai dengan SOP Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- d. Indikator Persentase Peningkatan Pemuda dan Olahraga yang Berprestasi di Tingkat Kota/Provinsi/Nasional dapat dikategorikan berhasil karena ada peningkatan dalam prestasi atlet di beberapa cabang olahraga.
- e. Indikator Persentase partisipasi dan prestasi masyarakat dalam kegiatan Olahraga di tingkat Kota/Propinsi/Nasional dapat dikategorikan berhasil karena partisipasi dan prestasi masyarakat dalam bidang olahraga mengalami peningkatan, seperti lomba olahraga tingkat kelurahan.
- f. Indikator Persentase sarana dan prasarana yang dibangun dan dipelihara dapat dikategorikan berhasil karena ada penambahan bangunan sarana dan prasarana olahraga.
- g. Indikator Persentase Peningkatan Jumlah kunjungan wisatawan dapat

dikategorikan berhasil karena adanya peningkatan jumlah wisatawan hal ini ditandai dengan semakin banyaknya hotel-hotel yang dibangun di kota Pontianak selain itu juga ada beberapa acara yang bertujuan untuk meningkatkan wisatawan seperti pesona kulminasi, cap go meh, Festival budaya dll.

- h. Indikator Persentase peningkatan industry berbasis kreativitas dapat dikategorikan berhasil karena semakin banyaknya event atau pameran yang di gelar di pusat perbelanjaan seperti Mall seperti festival music, pameran Pontianak expo, job fair dll.

Dari beberapa penjabaran terkait keberhasilan pelayanan tersebut dapat tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak

Tahun 2021-2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Persentase Peningkatan Atlet Berprestasi Tingkat Kota/Provinsi/Nasional					2,64	45%	55%	60%		2,64%	45%				100%	100%		
1	Indeks pengembangan kapasitas daya saing olahraga					2,64 %	70%	70%	70%		2,64%	70%				100%	100%		
	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi/Nasional					25,56%	20%	26,66%	33,33%		25,56%								
1	Indeks pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan					25,56%	70%	70%	70%		25,56%	70%				100%	100%		
2	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh					15,23%	90%	90%	90%		15,23%	90%				100%	100%		

Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun				Realisasi Capaian pada Tahun				Rasio Capaian pada Tahun						
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mengikuti Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					2%	25%	27%	30%			2%	25%			100%	100%		

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021 - 2024

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan		
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / KABUPATEN / KOTA	7.825.059.198	7.327.231.100	7.318.302.132	7.087.839.310	6.970.842.141	6.689.315.793			89,1%	91,29%			-3,24	-4,04				
2	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.412.478.685	1.166.737.859	1.040.223.250	1.240.597.250	852.148.685	1.124.674.925			60,3%	96,39%			-14,12	31,98				
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	76.124.330	150.000.000	150.000.000	0	71.599.330	150.000.000			94,1%	100%			48,52	100				
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHIRAGAAN	2.310.931.001	6.938.422.138	6.971.655.324	5.284.486.324	2.079.821.644	6.833.135.321			90%	98,48%			100	100				
5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	281.445.665	305.494.800	846.901.600	846.901.600	266.862.700	304.060.200			94,8%	99,53%			92,88	13,94				
6	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	246.977.964	519.054.050	900.939.920	658.897.520	235.379.950	517.832.125			95,3%	99,76%			91,87	120				
7	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN	0	0	0	50.000.000	0	0			0	0			0	0				

Tahun 2021 - 2024

N o.	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
8	PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	886.960.942	613.863.000	753.859.400	821.276.996	871.121.963	611.915.875			98,2%	99,68			-3,99	-29,76

2.3.1. Kinerja Pelayanan Bidang Kepemudaan

Tujuan pembangunan kepemudaan adalah untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan. Tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan prestasi dan peran serta aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial kemasyarakatan, politik dan budaya.

Pembangunan kepemudaan dilakukan melalui proses fasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan yang menitikberatkan kepada proses penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan. Pengembangan kepemudaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda, sehingga pada gilirannya dapat melahirkan pemuda yang maju yakni pemuda yang berkarakter, berkualitas, dan mandiri. Definisi pemuda itu sendiri adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bertujuan untuk menyadarkan sekaligus membina dan mengembangkan peran serta pemuda agar selalu aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan. Adapun kegiatan yang telah difasilitasi meliputi:

a) Fasilitasi kegiatan aksi bhakti sosial kepemudaan

Kegiatan bhakti sosial kepemudaan bertujuan untuk menumbuhkan semangat pemuda dalam bergotong-royong dan melestarikan lingkungan, meningkatkan dan menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan dan mempererat tali persaudaraan antara pemuda dengan masyarakat, sebagai wadah dalam rangka sosialisasi mengenai pentingnya kepedulian sosial, pendidikan dan kelestarian lingkungan, serta menumbuhkembangkan rasa semangat kepedulian terhadap lingkungan dan kesetiakawanan sosial bagi masyarakat.

Tahun 2023 kegiatan aksi bhakti sosial kepemudaan dilaksanakan dikarenakan di berbagai tempat Destinasi Wisata seperti Wisata Waterfront City dan Tugu Katulistiwa Pontianak serta sarana prasarana

olahraga yang di Kelola oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

b) Kegiatan Dialog Kepemudaan

Kegiatan dialog tentang kepemudaan dimaksudkan untuk menanamkan rasa kepedulian dikalangan pemuda untuk berperan serta terlibat dalam pembangunan daerah. Sehingga melalui dialog ini muncul ide dan pemikiran para pemuda terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan jalinan silaturahmi di kalangan sesama organisasi pemuda semakin erat.

Tahun 2023 kegiatan Dialog Pemuda dilaksanakan dengan melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan bagi Organisasi Pemuda baik itu tingkat Kelurahan Sampai tingkat kecamatan.

c) Kegiatan Pemilihan Pemuda pelopor

Kegiatan ini merupakan program nasional yang dilaksanakan setiap tahunnya sesuai dengan surat pemberitahuan dari Kemenpora. Seleksi Pemilihan Pemuda pelopor dilaksanakan untuk memilih pemuda-pemuda yang berpotensi, kreatif, ahli dan berprestasi di bidangnya. Bidang-bidang yang diseleksi sebanyak 4 bidang tergantung dari petunjuk dan pedoman dari kemenpora, berapa bidang yang akan diseleksi. Bidang tersebut antara lain bidang pendidikan, bidang teknologi tepat guna, bidang seni dan budaya dan bidang kewirausahaan. Target diusulkan untuk 4 bidang, berarti Target hanya 4 orang akan mewakili Kota Pontianak mengikuti seleksi di tingkat provinsi/nasional. Namun realisasi yang diperoleh hanya 2 orang yang bisa mewakili ke tingkat propinsi atau 50 %.

Tahun 2022 kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor dilaksanakan seleksi tingkat Kota dengan mengirimkan 3 orang wakil ke Tingkat Propinsi,

d) Kegiatan Fasilitasi Pertukaran Pemuda Antar Negara, Kapal Pemuda Nusantara dan Jambore Pemuda Indonesia.

Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara, Kapal Pemuda Nusantara dan Jambore Pemuda Indonesia juga merupakan program nasional yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan surat pemberitahuan dari Kemenpora. Target kinerja yang direncanakan sebanyak 15 orang yang lulus seleksi pada kegiatan dimaksud. Pada kegiatan ini peserta yang mewakili Kota Pontianak sebanyak 6 orang.

Melalui Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN), sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 utusan peserta yang berasal dari Kota Pontianak berhasil lulus ke Negara tujuan seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kanada, dan Australia, yang sebagian besar peserta yang terlibat dari kalangan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Pada Tahun 2009 sebanyak 2 orang (Kanada dan Australia), Tahun 2010 sebanyak 2 orang (Jepang dan Australia), Tahun 2011 sebanyak 4 orang (Jepang, Korea Selatan, Malaysia dan Kanada), Tahun 2012 sebanyak 1 orang (Malaysia), Tahun 2013 sebanyak 3 orang (Kanada, Malaysia dan Korea Selatan), tahun 2014 sebanyak 2 orang (Jepang dan Korea Selatan), tahun 2015 sebanyak 3 orang (Malaysia dan Cina), tahun 2016 sebanyak 2 orang (Cina dan India), tahun 2017 sebanyak 4 orang, tahun 2018 sebanyak 6 Orang (Jepang-Australia) dan yang mengikuti Kapal Pemuda Nusantara pada tahun 2012 sebanyak 9 orang, tahun 2013 sebanyak 8 orang, tahun 2014 sebanyak 1 orang, tahun 2015 sebanyak 1 orang, tahun 2016 sebanyak 1 orang, dan tahun 2018 sebanyak 4 orang peringkat Kota dan Propinsi, Untuk Jambore Pemuda Indonesia tahun 2012 sebanyak 1 orang (Sulteng/Palu), tahun 2013 sebanyak 2 orang (Kaltim/samarinda), tahun 2014 2 orang (D.I Aceh/Sabang), tahun 2015 sebanyak 2 orang (Kepulauan Riau /Tanjung Pinang), tahun 2016 sebanyak 2 orang (Kalteng/Palangkaraya), tahun 2018 sebanyak 4 orang. Selain dari pada itu tahun 2011 Kota Pontianak juga meraih prestasi sebagai Juara II Pemuda Pelopor Tingkat Nasional di bidang Pendidikan dan Juara IV di bidang Kewirausahaan.

Untuk tahun 2021 Pertukaran Pemuda Antar Negara tidak dapat dilaksanakan ditingkat Kota dikarenakan pandemi Covid-19, namun langsung dilaksanakan seleksi ditingkat Propinsi, Kota Pontianak lulus 1 (satu) orang perwakilan Tingkat Propinsi yang mewakili Kalimantan Barat ke tingkat Nasional dan dikirim menjadi Pertukaran Pemuda Antar Negara Indonesia – Singapura. Demikian juga di Tahun 2022 seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara tidak dilaksanakan di tingkat Kota, namun peserta langsung diseleksi di Tingkat Propinsi, yang kemudian lulus seleksi mewakili Kalimantan Barat ke Tingkat Nasional sebagai Pertukaran Pemuda Indonesia – Singapura.

e) Kegiatan Fasilitasi Kreatifitas/Daya Cipta Pemuda Dalam Rangka Memperingati Hari Sumpah Pemuda

Kegiatan lomba kreativitas pemuda dalam rangka Hari Sumpah Pemuda dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan serta silaturahmi antar sesama warga Kota Pontianak, mengajak warga Kota Pontianak khususnya pemuda agar gemar membaca dan menulis serta memajukan literasi, mengembangkan potensi karya-karya penulis lokal di Kota Pontianak, dan mengenalkan Kota Pontianak melalui tulisan. Tahun 2021 kegiatan fasilitasi Daya Cipta Pemuda dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi Covid-19.

f) Kegiatan Fasilitasi Lomba Tata Upacara Bendera

Kegiatan lomba tata upacara bendera dilaksanakan dengan tujuan sebagai sarana revitalisasi rasa nasionalisme, bela negara, cinta tanah air, pembinaan rasa persatuan dan kesatuan di kalangan generasi muda, khususnya pelajar SLTA/ sederajat se-Kota Pontianak, serta mempersiapkan calon-calon peserta anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Pontianak. Adapun sasaran kegiatan ini adalah pelajar tingkat SLTA/ sederajat di Kota Pontianak. Kegiatan ini berupa perlombaan gerakan baris- berbaris yang dikemas dalam sistem pos dan bersifat berjenjang sehingga seluruh peserta yang berpartisipasi di dalam kegiatan ini adalah seluruh peleton inti terbaik dari masing-masing sekolah.

Tahun 2021 kegiatan fasilitasi lomba tata upacara bendera tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Pandemi Covid-19.

g) Kegiatan Bina Lingkungan Kepemudaan

Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah memfasilitasi pemuda dalam menemukan dan menentkan bakat pada diri pemuda itu sendiri yang pada akhirnya mendukung program atau kegiatan dalam pembangunan Kota Pontianak khususnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan pengembangan kepemudaan.

Tahun 2021 kegiatan fasilitasi lomba tata upacara bendera tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Pandemi Covid-19.

h) Pembentukan Tim Paskibraka Kota Pontianak

Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Peraturan Bendera Kebangsaan dan Instruksi Presiden nomor 14 Tahun 1981 tanggal 1 Desember 1981 tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih, maka dilaksanakan kegiatan Pembentukan Tim Paskibra Kota Pontianak, yang melibatkan unsur TNI Angkatan Darat, Polri Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Purna Paskibraka Indonesia Kota Pontianak, Psikolog, Akademisi dan Medis. Kegiatan pembentukan Tim Paskibraka Kota Pontianak dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan setiap tanggal 17 Agustus.

Tahun 2021 terpilih 32 orang peserta Tim Paskibraka perwakilan sekolah-sekolah SMA sedrajat di Kota Pontianak. Rangkaian kegiatan seleksi Tim Paskibraka

dilaksanakan selama kurang lebih selama 6 (enam) bulan sampai Hari H pelaksanaan Pengibaran bendera tanggal 17 Agustus .

i) Fasilitasi Kegiatan Kepramukaan

Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan definisi pemuda adalah usia 16 tahun sampai dengan usia 30 tahun. Pramuka adalah bagian dari definisi pemuda, bahwa pembangunan kepribadian ditujukan untuk mengembangkan potensi diri dan kecakapan hidup bagi setiap warga negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat bahwa pengembangan potensi diri sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam berbagai upaya penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui gerakan pramuka.

Tahun 2021 telah dilaksanakan pembinaan 28 Kwarcab se Kota Pontianak yang diwakili oleh Pembina disekolah-sekolah, kegiatan ini dimaksudkan sebagai peningkatan kapasitas Kwartir Cabang dalam menjalankan tugas fungsinya di dalam Gugus Depan masing-masing.

j) Pekan Kreasi Pemuda

Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, maka pada tahun 2018 Disporapar Kota Pontianak memfasilitasi organisasi kepemudaan

melalui kegiatan Pekan Kreasi Pemuda Kota Pontianak. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai etalase prestasi dan karya pemuda, wadah kreatifitas dan inovasi pemuda, mengenalkan potensi Kota Pontianak melalui karya pemuda-pemudi berprestasi dalam berbagai bidang serta mempererat persaudaraan dan silaturahmi antar pemuda melalui wadah OKP, komunitas maupun perorangan.

Tahun 2021 kegiatan fasilitasi lomba tata upacara bendera tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Pandemi Covid-19.

2.3.2 Kinerja Pelayanan Bidang Olahraga

Olahraga merupakan sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional. Tumbuhnya kesadaran warga untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Hal ini dapat dilihat semakin banyaknya anggota masyarakat di suatu wilayah yang melakukan kegiatan olahraga, seperti senam jantung sehat, senam kesegaran jasmani, jalan sehat dan lain sebagainya. Luasnya tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan berolahraga bagi masyarakat dalam bentuk lahan, bangunan, atau ruang terbuka yang digunakan untuk kegiatan berolahraga dan dapat diakses oleh masyarakat luas mencerminkan bahwa Olahraga menjadi suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Berbagai kemajuan dan prestasi olahraga yang dicapai akan bermuara pada meningkatnya budaya dan prestasi olahraga. Prestasi Atlet olahraga Kota Pontianak antara lain ditunjukkan dengan perolehan medali dari cabang olahraga di tingkat nasional pada Pekan Olahraga Nasional, Pekan Olahraga Pelajar Nasional, Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Wilayah dan Prestasi Tingkat Daerah seperti Kejuaraan Pekan Olahraga Tingkat Propinsi (PORPROP), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA).

Kemajuan dan prestasi yang dicapai belum secara signifikan dengan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang ada. Pemerintah Kota sudah berupaya memfasilitasi menyediakan prasarana olahraga seperti gedung Bulutangkis di Jl. Tabrani Ahmad, pembangunan kolam renang Ampera di Jl. Ujung Pandang II, Peningkatan dan pemeliharaan lapangan Sepakbola di Kecamatan Pontianak timur dan Lapangan Sepakbola Hanura Kecamatan Pontianak Kota. Selain dari pada itu dalam rangka peningkatan prestasi dan

memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Salah satu wujud pembinaan yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah memfasilitasi berbagai kejuaraan cabang olahraga, dalam rangka membina dan mencari bibit olahragawan muda di kalangan pelajar.

2.3.3 Kinerja Pelayanan Bidang Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu urusan yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian kota selain sektor perdagangan dan jasa. Keterkaitan tiga sektor tersebut amatlah erat sehingga pengembangan kepariwisataan tidak akan lepas pengaruhnya dari dua sektor lainnya tersebut.

Pembangunan urusan pariwisata tidak terlepas dari arah kebijakan umum yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi antara lain ;

- a. meningkatkan kerjasama tingkat sektoral, destinasi, sdm pariwisata, kualitas produk dan pelayanan pariwisata;
- b. pemetaan objek daya tarik wisata (ODTW) yang berbasis tepian sungai;
- c. meningkatkan promosi parawisata melalui media cetak dan elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut selama periode tahun 2014-2018 pelaksanaan pembangunan pariwisata dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Hasil pendataan pada hotel dan penginapan di Kota Pontianak dapat terlihat bahwa lamanya rata-rata kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di Kota Pontianak tidak mengalami peningkatan. Hal ini dapat tergambarkan periode tahun 2014- 2019 lamanya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara selalu sama yakni rata-rata 1-3 hari.

Perkembangan pariwisata dapat dilihat dari indikator jumlah kunjungan wisata. Dalam lima tahun terakhir angkanya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 jumlah wisatawan yang berkunjung sebanyak 814.480 orang, pada tahun 2014 sebanyak 957.025 orang, pada tahun 2015 sebanyak 921.172, pada tahun 2016 sebanyak 969.617, pada tahun 2017 sebanyak 989.591 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 1.125.037 orang. Tahun 2019 jumlah kunjungan

wisatwan sebanyak 1.189.752 orang baik wisatawan Nusantara maupun Wisatawan Mancanegara, namun di Tahun 2020 kunjungan wisatawan mengalami penurunan dikarenakan Pandemi Covid-19, yaitu sebanyak 708.066 orang, dengan berangsurnya Pandemi Covid-19 kunjungan wisata mulai mengalami peningkatan, terbukti di tahun 2021 wisatawan Nusantara dan Mancanegara berkunjung ke Kota Pontianak sebanyak 851.156 orang.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata merupakan salah satu faktor yang penting di dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah Kota Pontianak melakukan perbaikan berbagai infrastruktur dasar perkotaan dalam rangka memacu pertumbuhan sektor-sektor strategis, termasuk di dalamnya pariwisata. Disisi lain sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang telah terbangun seperti hotel berbintang dan hotel non berbintang mengalami peningkatan jumlahnya pada tahun 2021 dengan jumlah hotel sebanyak 57 buah, restoran sebanyak 38 buah, café sebanyak 66 buah, rumah makan sebanyak 156 buah, warung kopi sebanyak 59 buah, fitness centre sebanyak 11 buah, sarana dan fasilitas olahraga 7, bioskop 1 buah, karaoke sebanyak 19 buah, salon kecantikan sebanyak 43 buah.

Dampak dari Pandemi Covid-19 di tahun 2020 sampai sekarang ada beberapa Hotel yang melakukan pengurangan pegawai sampai menutup Hotel (Hotel Santika), karena tingkat kunjungan wisatawan menurun drastis sehingga tidak dapat menutupi operasional Hotel.

Kota Pontianak memiliki objek wisata yang sangat potensial dan dapat menunjang pengembangan kepariwisataan. Selama periode tahun 2009 – 2022 terdapat 19 objek wisata antara lain ;

- a. Tugu Khatulistiwa;
- b. Keraton Kadariah;
- c. Masjid Jami;
- d. Makam Batu Layang;
- e. Taman Alun Kapuas;
- f. Aloe Vera Centre;
- g. Pelabuhan Seng Hie;
- h. SDN 14 Pontianak;
- i. Vihara Bodhisatva Karaniya Metta
- j. Masjid Baitannur;
- k. Kampung Caping;

- l. Kampung Warna-warni
- m. Rumah Radank;
- n. Masjid Raya Mujahidin;
- o. Kampung Beting;
- p. Museum Negeri;
- q. Taman Arboretum Untan;
- r. Taman Catur;
- s. Kolam Renang Jc Oevang Oeray dan ;
- t. Kolam Renang Ampera.

2.3.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak membutuhkan Anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak. Adapun Anggaran dan Realisasi pendanaan dalam kurun waktu 2015-2022 sesuai dengan Program yang ditetapkan dapat dilihat berikut ini.

- a. Tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 11 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp 24.968.849.090 Dengan realisasi Rp 23.734.678.459 atau 95.06%.
- b. Tahun 2016 dilaksakan 10 Program dengan Anggaran Rp 4.186.991.000 dan Realisasi sebesar Rp 3.937.862.837 atau 94.05%
- c. Tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 19 Program dengan Anggaran Sebesar Rp 11.248.243.640 Dan Realisasi Rp 10.620.685.927 atau 94,42%
- d. Tahun 2018 dilaksakan kegiatan sebanyak 18 Program dengan Anggaran sebesar Rp 10.393.199.593 dengan Realisasi sebesar Rp 9.125.734.824 atau 87,80%.
- e. Tahun 2019 dilaksanakan kegiatan sebanyak 14 Program dengan Anggaran sebesar Rp 16.658.639.000 dengan Realisasi sebesar Rp 14.264.345.445.47 atau 85,62%.
- f. Tahun 2020 dilaksanakan kegiatan sebanyak 11 Program dengan Anggaran sebesar Rp 13.574.509.355 dengan Realisasi sebesar Rp 11.829.955.664 atau 87,1%.
- g. Tahun 2021 dilaksanakan kegiatan sebanyak 7 Program dengan Anggaran sebesar Rp 13.039.977.785 dengan Realisasi sebesar Rp 11.347.794.513 atau 8,02%.

Dari Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana diuraikan diatas, secara tabel dan grafik Pagu Anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak. Sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, maka secara resmi Dinas Kepemudaan.Olahraga dan Pariwisata dimulai pada tahun 2017, pada table 2.6 diatas anggaran dan realisasi pada tahun 2015 dan 2016 tidak dapat disajikan karena tidak tersedianya data- data tersebut. Untuk melihat rasio antara anggaran dan realisasi yang baik hanya dapat dilihat mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Setiap tahunnya terdapat kenaikan anggaran hampir disemua program dan kegiatan, demikian juga dengan realisasi anggaran setiap tahunnya cenderung baik karena hampir disemua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Dari tahun 2017 sampai 2019 ada beberapa program dan kegiatan yang mengalami perubahan seperti sarana dan prasarana olahraga, sehingga dapat dilihat di tahun 2017 sarana dan prasarana olahraga merupakan program kegiatan namun ditahun 2019 diubah menjadi kegiatan peningkatan sarana prasana karena dianggap program yang ada tidak sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan sehingga terjadi perubahan nama program dan kegiatan. namun dengan perubahan ini tidak mempengaruhi realisasi anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berangkat dari kondisi dan capaian pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak, maka kemudian ada beberapa aspek yang menjadi tantangan bagi pengembangan pelayanan di Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata kedepannya, yaitu :

A. Bidang Kepemudaan

- 1) Gencarnya nilai-nilai asing yang masuk ke Kota Pontianak melalui berbagai media.
- 2) Lemahnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif.

- 3) Belum terbangunnya jiwa kewirausahaan dan kemampuan pengembangan ekonomi produktif dan kreatif di kalangan pemuda.
- 4) Masih rendahnya partisipasi organisasi dan pemuda secara aktif dalam pembangunan daerah.

B. Bidang Keolahragaan

- 1) Semakin ketatnya persaingan prestasi olahraga di tingkat nasional.
- 2) Meningkatnya kualitas IPTEK keolahragaan di tingkat nasional.
- 3) Belum maksimalnya dukungan orang tua terhadap profesi atlet.

C. Berkembangnya olahraga rekreasi yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan kegemaran dan kemampuan, misalnya sepeda dan renang. Bidang Pariwisata

- 1) Berkembangnya daya saing destinasi pariwisata di tingkat nasional.
- 2) Belum meratanya penyebaran wisatawan sesuai segmen pasar wisata.
- 3) Meningkatnya persaingan kualitas sumber daya manusia dan lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif.

Adapun yang menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yaitu:

A. Bidang Kepemudaan

- 1) Jumlah dan potensi generasi muda yang besar serta meningkatnya organisasi atau kelompok kepemudaan dan keolahragaan yang masih perlu untuk diberdayakan.

B. Bidang Keolahragaan

- 1) Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat untuk memiliki kehidupan yang sehat melalui olahraga.
- 2) Meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap berbagai event olahraga baik secara nasional maupun internasional.

C. Bidang Pariwisata

- 1) Pertumbuhan pembangunan infrastruktur di pusat kota yang dapat dijadikan destinasi wisata, seperti taman catur, taman digulis dan alun Kapuas.
- 2) Meningkatnya industri jasa dan sarana pariwisata, seperti kapal-kapal wisata di Sungai Kapuas.
- 3) Berkembangnya event dan promosi pariwisata di daerah.
- 4) Berkembangnya media sosial.
- 5) Kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang semakin meningkat sehingga taman-taman kota menjadi salah satu tujuan wisata masyarakat baik lokal maupun luar daerah.
- 6) Tersedianya lembaga bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, misalnya PHRI Kota Pontianak.
- 7) Munculnya kampung-kampung tujuan wisata seperti kampung caping, kampung tenun, kampung warna-warni, kampung kamboja, kampung tua dll.
- 8) Terpentuknya Kelompok-kelompok masyarakat yang sadar wisata (Pokdarwis) di beberapa kelurahan terutama kelurahan yang memiliki spot wisata.

Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak adalah bersumber dari lain-lain PAD yang sah berupa hasil Retribusi Sarana dan Prasarana Olahraga. Adapun upaya dalam mengoptimalisasikan PAD ini, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak terus berupaya terus meningkatkan pendapatan retribusi Sarana dan Prasarana Olahraga dengan kebijakan-kebijakan :

1. Cara pembayaran dengan melalui pemindahbukuan rekening penyewa ke rekening bendahara penerimaan dan menggunakan aplikasi Q-RIS.
2. Penagihan secara rutin kepada penyewa sarana prasarana olahraga baik secara langsung maupun secara tertulis,
3. Memberikan peringatan terkait piutang dan membuat surat pernyataan kepada penyewa untuk membayar.

Tabel 2.7
Pendapatan Retribusi Sarana dan Prasarana Tahun 2025-2029

No	Uraian Pendapatan	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2026 (Rp.)	Tahun 2027 (Rp.)	Tahun 2028 (Rp.)	Tahun 2028 (Rp.)
1.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.490.200.000	3.921.885.000	4.403.280.000	4.542.640.000	4.702.600.000
2.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kantin Kolam renang Ampera dan Sewa Kantin GOR BuluTangkis)	25.000.000	25.000.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000
	Jumlah	3.515.200.000	3.946.885.000	4.437.780.000	4.577.140.000	4.737.100.000

1.1. Permasalahan Pelayanan

Permasalahan pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak antara lain sebagai berikut :

1. Masih banyaknya pemuda menganggur dari keluarga miskin
2. Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat nasional dan internasional
3. Kurangnya sarana dan prasarana berstandart
4. Rendahnya kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK
5. Kurangnya kesinambungan pembibitan, pembinaan atlet dan kemitraan dengan stakeholder
6. Rendahnya kualitas destinasi pariwisata yang berbasis keunikan lokal dan terkoneksi antar wilayah
7. Rendahnya kualitas industri pariwisata yang berdaya saing
8. Belum efektif dan sinerginya pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
9. Masih rendahnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata
10. Belum optimalnya kerjasama antar lembaga kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Permasalahan tersebut kemudian dipetakan mulai dari masalah pokok sampai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang telah secara jelas terangkum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Disporapar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih Kurangnya Kapasitas dan Kemandirian Pemuda	Masih banyaknya pemuda menganggur dari keluarga miskin.	1. Kurang optimalnya kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam pembangunan 2. Rendahnya kewirausahaan pemuda.
2	Belum Optimalnya Kualitas Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Daerah	1. Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat nasional dan internasional. 2. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga berstandart. 3. Rendahnya kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK. 4. Kurangnya	1. Belum maksimalnya pola pembibitan dan pembinaan yang berkesinambungan. 2. Rendahnya kualitas sarana prasarana olahraga berstandart. 3. Masih minimnya pelatihan SDM Olahraga berbasis IPTEK 4. Masih belum optimalnya pembinaan antar stakeholder keolahragaan.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kesinambungan pembibitan, pembinaan atlet dan kemitraan dengan stakeholder.	
3.	Belum Optimalnya Pembangunan Kepariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas destinasi pariwisata yang berbasis keunikan lokal dan terkoneksi antar wilayah. 2. Rendahnya kualitas industri pariwisata yang berdaya saing. 3. Belum efektif dan sinerginya pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara. 4. Masih rendahnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata. 5. Belum optimalnya kerjasama antar lembaga kepariwisataan dan ekonomi kreatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu pengembangan kawasan destinasi pariwisata. 2. Perlu peningkatan kualitas keunikan lokal menjadi daya tarik wisata. 3. Perlu meningkatkan kualitas pelayanan pada industri pariwisata. 4. Perlu pengembangan pasar wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. 5. Perlu meningkatkan kualitas sarana prasarana informasi dan promosi pariwisata. 6. Perlu meningkatkan kualitas promosi pariwisata di dalam dan luar negeri. 7. Perlu meningkatkan kemampuan dan profesionalitas SDM pariwisata yang berdaya saing. 8. Perlu pengembangan pemberdayaan masyarakat disekitar destinasi pariwisata yang berbasis ekososio <i>tourism</i>. 9. Perlu pengembangan dan kerjasama antar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata antara lain :

1. Banyak organisasi cabang olahraga yang dikelola seadanya
2. Masih terbatasnya sarana prasarana pendukung bagi para atlet olahraga prestasi
3. Belum ada prioritas dalam pembinaan cabang olahraga tertentu
4. Pemuda banyak yang masih berharap pada pekerjaan di sektor formal
5. Destinasi wisata sudah banyak namun belum dikelola secara profesional
6. Produk wisata unggulan belum memiliki daya jual
7. Minat Investor untuk menanamkan modal dibidang pariwisata masih rendah
8. Pemanfaatan pengunjung lintas negara tetangga melewati border di Kalimantan Barat
9. Penguatan kemitraan para pelaku industri pariwisata
10. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung iklim pariwisata yang kondusif
11. Event- event maupun potensi obyek wisata belum dikelola secara profesional
12. Pemanfaatan Teknologi digital dalam pengembangan industri pariwisata
13. Peningkatan kemampuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif
14. Promosi berbagai jenis produk ekonomi kreatif daerah seperti penyelenggaraan kegiatan pameran dagang, baik berskala daerah, nasional maupun internasional
15. Ekonomi Kreatif dapat dipandang sebagai penggerak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu bangsa (engine of economic growth and development) yang memberikan kontribusi secara nyata pada perekonomian daerah dan nasional.
16. Ekonomi kreatif yang mengedepankan inovasi dan kreatifitas perlu didukung kejelasan aturan hukum terkait HKI. HKI masih belum diaplikasikan dengan baik

Kondisi saat ini bahwa peningkatan kualitas kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan belum mampu menunjukkan prestasi yang lebih baik secara signifikan supaya menjadi lebih berkualitas dan mandiri. Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan pokok dalam lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun internal. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi, antara lain :

A. Analisis Eksternal

Kinerja pemerintahan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi menerima kesuksesan atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi pemerintahan secara sinergis dan efisien.

a. Peluang

- 1) Potensi di bidang kepemudaan, keolahragaan, kepariwisataan, dan ekonomi kreatif yang cukup besar;
- 2) Tersedianya dukungan database organisasi kepemudaan, keolahragaan, kepariwisataan, dan ekonomi kreatif;
- 3) Komitmen pemerintah, masyarakat, pemuda, pelaku olahraga, dan pelaku ekonomi kreatif untuk memajukan kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- 4) Mendorong generasi muda agar lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan –kegiatan kepemudaan dalam pembangunan daerah;
- 5) Melakukan pemetaan untuk menentukan cabang olahraga unggulan, harapan dan partisipan, agar dapat lebih fokus dalam melakukan pembinaan dan pengembangan cabang-cabang olahraga;
- 6) Meningkatkan koordinasi dan sinergisitas antara pelaku-pelaku olahraga dengan pengurus cabang olahraga, Koni dan pemerintah daerah agar tercipta olahraga yang menjadi unggulan daerah;
- 7) Meningkatkan potensi sumber daya kepariwisataan dengan memanfaatkan kemitraan, dan fasilitasi terhadap organisasi, masyarakat, baik swasta maupun pemerintah dalam upaya penyadaran, peningkatan dan pengembangan terhadap potensi pariwisata sehingga para stakeholder dapat berperan aktif dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan kepariwisataan agar menjadi destinasi yang menarik, unggul dan berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

b. Tantangan

- 1) Masih rendahnya partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan;
- 2) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan organisasi pemuda;
- 3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi yang belum maksimal;
- 4) Masih minimnya prestasi olahraga di tingkat nasional;
- 5) Dukungan fasilitas terhadap sektor pariwisata kota belum optimal;
- 6) Belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata;
- 7) Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain, ilmu, teknologi, dan budaya;
- 8) Sistem manajemen baik dari pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata dan usaha ekonomi kreatif masih lemah;
- 9) Pengembangan obyek wisata, atraksi dan produk pariwisata terkendala karena terbatasnya investasi di bidang pariwisata;
- 10) Belum maksimalnya kolaborasi antar actor yang mendukung berkembangnya ekonomi kreatif;
- 11) Permodalan masih jadi kendala pengembangan ekonomi kreatif Karen mayoritas subsektor industri kreatif bersifat intangible atau tak terlihat.

B. Analisis Internal

Secara garis besar, tinjauan internal bertujuan untuk memahami diri, memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi dan modal pembangunan. Kesadaran akan potensi diri serta kelemahan yang dimiliki akan memberikan arah yang jelas terhadap perbaikan dan eksploitasi apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan deskripsi kondisi dan isu-isu strategis yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, sebagai berikut ;

a. Kekuatan

- 1) Peraturan yang jelas tentang kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan;
- 2) Komitmen yang jelas dari Pemerintah mendukung kegiatan kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan;

- 3) Kualitas dan kuantitas SDM yang memadai;
- 4) Sarana dan prasarana kerja yang memadai.

b. Kelemahan

- 1) Terbatasnya alokasi anggaran pembinaan dan pengembangan pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 2) Belum adanya data base kepemudaan, keolahragaan, kepariwisataan, dan ekonomi kreatif yang akurat;
- 3) Rendahnya dukungan dari pemerintah, masyarakat dan swasta;
- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Program-program untuk mendukung misi ini, dikelompokkan sesuai urusan dan SKPD pelaksanaannya antara lain Urusan Kepemudaan, Olahraga dan urusan pariwisata, yang meliputi:

- a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
- b. Program pengembangan kapasitas kepramukaan
- c. Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
- d. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
- e. Program pemasaran pariwisata
- f. Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif
- g. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual
- h. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara

bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing-masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang awalnya *money follow function* berubah menjadi pendekatan *money follow program*. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024).

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama.

Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerja sama antar perangkat daerah. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 2.9

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
1. Water Front Sungai Kapuas 2. Sarana prasarna Olahraga	Pemanfaatan destinasi wisata belum di kelola optimal serta belum sinkronnya acara acara seperti olahraga wisata, dan kebudayaan		ASEAN sebagai episentrum event (MICE) berskala internasional	1. Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.		IKN memberi dampak positif bagi sektor pariwisata dengan meningkatnya kunjungan ke Ibu Kota.
	Belum optimalnya pembangunan waterfront city pada seluruh tepian Sungai Kapuas dan sarana prasarana pariwisata lainnya		Pengembangan Program Pariwisata Digital dengan meningkatkan jumlah start-up atau perusahaan rintisan di bidang pariwisata	2. Peningkatan pariwisata berkelanjutan serta ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual dan berorientasi ekspor.		

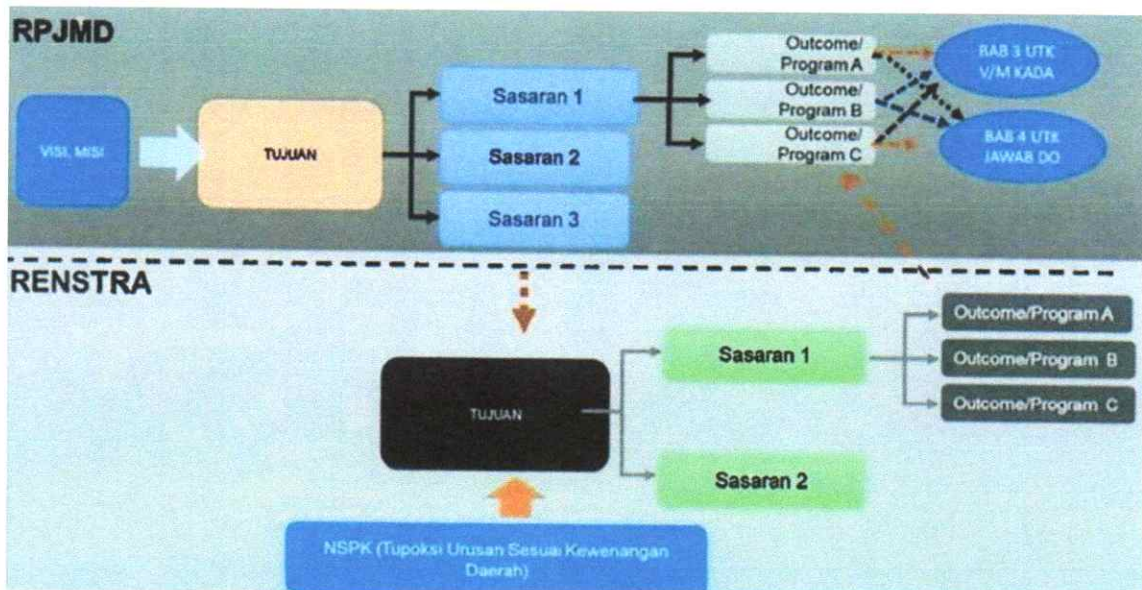
BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

- 1) Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.
- 2) Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- 3) Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak.
- 4) Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Renstra Kota Pontianak Tahun 2025-2029, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya.
- 5) Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak.
- 6) Berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran, telah dilakukan telaahan terhadap tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Renstra Kota Pontianak Tahun 2025-2029. Dari hasil telaahan tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak mendukung arah kebijakan Kota Pontianak dalam hal “Meningkatnya Kapasitas Pemuda dan Atlet Berprestasi serta Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata”.

Gambar 3.1
 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Resntra
 Perangkat Daerah

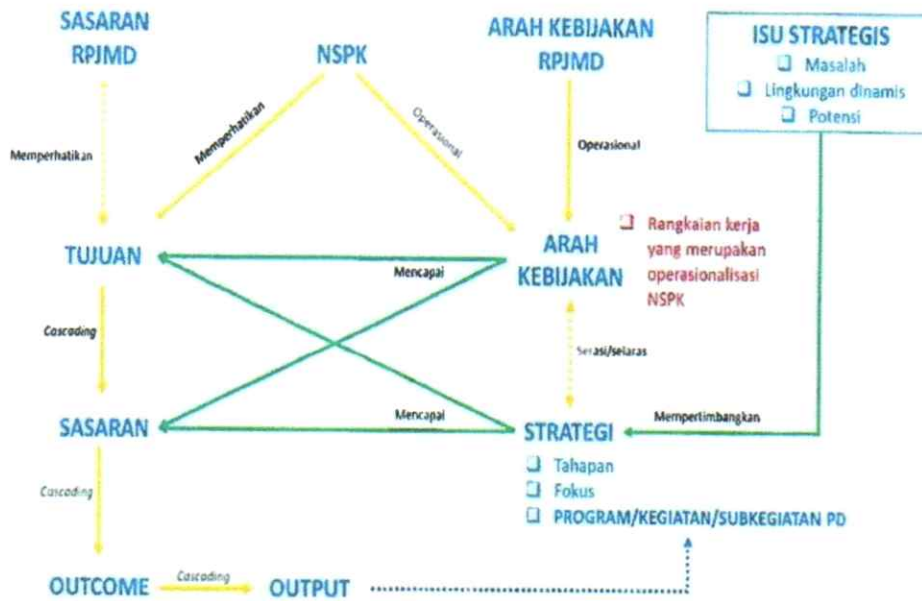


3.2. Sasaran

Dari hasil telaahan terhadap Renstra Kota Pontianak Tahun 2025-2029, serta telaahan terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran- sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, dimana memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah. Dalam uraian tugas dan fungsi tersebut, terlihat bahwa bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata memiliki keterkaitan karena dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah, dimana memiliki peran yang penting dalam mendukung terciptanya para atlet dan pemuda serta pertumbuhan sektor pariwisata di kota Pontianak.

Gambar 3.2
Konsep Renstra Perangkat daerah



Dengan demikian, untuk pencapaian tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, yaitu dengan mempertimbangan tugas fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak serta aturan-aturan terkait urusan pemuda, olahraga dan pariwisata, maka ditetapkan sasaran dan indikator dalam Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2025-2029 yaitu sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

3.3 Strategi Disporapar

Strategi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Pontianak menetapkan tujuan dan program untuk tahun 2025- 2029. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait. Ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat. Agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dari rencana strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak. Selanjutnya Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan disajikan secara lengkap dalam tabel dibawah ini:

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					KET	
					2025	2026	2027	2028	2029		2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA											
- Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda - Meningkatnya Produktivitas Ekonomi	Meningkatnya Kapasitas Pemuda dan Atlet Berprestasi serta Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Indeks Pembangunan Pemuda (Indeks)	-	55	55,55	56	56,75	57	57,85		
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata (%)	3,2	3,25	3,34	3,48	3,5	3,65		
			Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) (Indeks)	0,3	0,32	0,325	0,33	0,335	0,34		
			Persentase Peningkatan Jumlah Atlet Peraih Medali (%)	2,5	2,7	2,9	3	3,2	3,5		
		Meningkatnya Kemampuan Pemuda	Persentase Pemuda yang Mengikuti Pelatihan dan Keterampilan/Keahlian (%)	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65		
		Meningkatnya Lama Tinggal wisatawan dan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Tingkat kunjungan wisatawan (%)	16,5	22	24	25	28	30		

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak

Visi : Kota Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis

Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

Tahun Pertama (2026)	Tahun Kedua (2027)	Tahun Ketiga (2028)	Tahun Keempat (2029)	Tahun Kelima (2030)
Tahap Konsolidasi	Tahap Percepatan	Tahap Pengembangan	Tahap Pematangan	Tahap Penguatan
Penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor	Peningkatan kapasitas SDM (pelatihan, sertifikasi, workshop)	Pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana	Penguatan kelembagaan komunitas pemuda dan cabang olahraga	Optimalisasi Penguatan dan Pengembangan daya saing atlet dan destinasi wisata
Identifikasi kebutuhan pemuda, olahraga, dan pariwisata	Fasilitasi kegiatan pemuda dan pembinaan atlet	Kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas	Standarisasi layanan pariwisata	Pembentukan jejaring kerjasama regional/nasional/internasional

Pemetaan potensi daerah dan basis data awal	Peningkatan promosi destinasi wisata unggulan	Optimalisasi teknologi informasi untuk promosi pariwisata	Pengembangan event olahraga dan pariwisata berskala nasional	Penguatan dan Pengembangan event olahraga dan pariwisata berskala nasional
---	---	---	--	--

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kota Pontianak

Visi : Kota Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis

Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1. Optimalisasi pengembangan Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	1. penguatan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, dan Optimalisasi PAD pada Sarana Prasarana Olahraga dan Destinasi Wisata yang dikelola Disporapar	
2. Percepatan pembangunan ekonomi dan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif	2. implementasi aglomerasi wisata dan ekonomi kreatif	2. Meningkatkan Penayadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda	
3. Pengembangan pembangunan ekonomi dan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif	3. aglomerasi wisata dan ekonomi kreatif		

- Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
3. Meningkatkan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
 4. Melakukan Promosi Pariwisata Keluar Daerah
 5. Menyelenggarakan Event Pariwisata
 6. Melaksanakan Pembangunan, penataan dan pengembangan destinasi wisata
 7. Menyusun Peraturan Pariwisata
 8. Melakukan analisa, evaluasi, pembinaan dan pelatihan pelaku usaha pariwisata
 9. Melakukan Sosialisasi dan Workshop ekonomi kreatif
 10. Melakukan Analisa, evaluasi, pembinaan dan pelatihan ekonomi kreatif
- Menyelenggarakan festival dan pameran ekonomi kreatif

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program DISPORAPAR Kota Pontianak merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun ke depan yaitu yaitu dari Tahun 2025-2029 dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program-program pada DISPORAPAR Kota Pontianak Tahun 2023 sebanyak 8 (Delapan) program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Rutin Administrasi Perkantoran dan 7 (Tujuh) Program Pokok Pembangunan (Program Strategis) dan 55 (lima puluh lima) Subkegiatan

4.1. Uraian Program

DISPORAPAR merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Dengan demikian, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak memiliki kewajiban dalam melaksanakan kinerja pelayanan di urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

Untuk menerjemahkan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Bab sebelumnya ke dalam kerangka kerja yang lebih konkret dan operasional, maka disusunlah sejumlah Program Strategis DISPORAPAR Kota Pontianak untuk Tahun 2025-2029. Program – Program ini merupakan instrumen utama untuk mengalokasikan sumber daya dan mengarahkan seluruh Kegiatan demi mencapai target kinerja yang diharapkan.

Penyusunan Program telah diselaraskan dengan nomenklatur terbaru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 -2850 Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi dan integrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran nasional. Program-Program inilah yang akan menjadi landasan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan sehingga memastikan bahwa setiap Kegiatan dan alokasi anggaran berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel untuk mendukung Visi Pembangunan Kota Pontianak.

Uraian Program dalam Renstra DISPORAPAR Kota Pontianak disajikan dalam bentuk tabel 4.1. berikut ini :

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLARHAGA				21.132.933.250			16.670.611.000		15.633.200.900		16.070.163.250		16.578.667.619			
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.037.495.084			8.886.352.934		8.708.942.834		8.837.905.184		8.944.409.553			
Terpenuhinya Layanan Administrasi Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100	9.037.495.084	100	8.886.352.934	100	8.708.942.834	100	8.837.905.184	100	8.944.409.553		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				1.111.388.266			1.031.388.266		1.131.388.266		1.271.388.266		1.391.388.266			
Meningkatnya Jumlah Organisasi Kepemudaan yang berpartisipasi dan aktif dalam event kepemudaan secara berjenjang	Rasio Wirasaha Pemuda (%)	-	2,26	2,28	1.111.388.266	2,3	1.031.388.266	2,32	1.131.388.266	2,34	1.271.388.266	2,36	1.391.388.266		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLARHAGAAN				10.834.049.900			6.602.869.800		5.642.869.800		5.810.869.800		6.092.869.800			
Meningkatnya Jumlah Cabang yang menjuarai Event tingkat Kab/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional	Persentase Peningkatan Atlet berprestasi (%)	2,3	2,5	2,7	10.834.049.900	2,9	6.602.869.800	3,2	5.642.869.800	3,5	5.810.869.800	3,8	6.092.869.800		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	

2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina setiap Tahun	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam kepramukaan (%)	100	100	100	100	100	100	100	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										1.620.000.000	1.505.000.000	1.688.890.100	1.775.000.000		1.775.000.000	1.775.000.000	1.775.000.000	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA										525.000.000	355.000.000	455.000.000	455.000.000		455.000.000	455.000.000	455.000.000	
Meningkatnya Jumlah Destinasi wisata yang tingkatan sarprasnya serta pembinaan terhadap pelaku usaha wisata di Kota Pontianak		Persentase Destinasi Wisata dengan Kondisi Baik (%)	15	15	16	16,5	17	18	18,5	525.000.000	355.000.000	455.000.000	455.000.000		455.000.000	455.000.000	455.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA										500.000.000	550.000.000	550.000.000	600.000.000		600.000.000	600.000.000	600.000.000	
Meningkatnya Jumlah Kunjungan dan Iama tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kota Pontianak		Jumlah Kunjungan Wisatawan (%)	-	35.000	35.200	35.500	35.750	36.000	36.300	500.000.000	550.000.000	550.000.000	600.000.000		600.000.000	600.000.000	600.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL										115.000.000	110.000.000	130.000.000	130.000.000		130.000.000	130.000.000	130.000.000	
Meningkatnya Pelaku Ekonomi kreatif yang bersertifikat HKI		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat HKI (%)	23	25	30	32	35	40	42	115.000.000	110.000.000	130.000.000	130.000.000		130.000.000	130.000.000	130.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		TARG ET	PAGU	
				TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif Yang dilatih	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terlatih (%)	23	25	27	480.000.000		490.000.000		553.890.100		590.000.000		590.000.000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata	
TOTAL KESELURUHAN					22752933250.00		18175611000.00		17322091000.00		17845163250.00		18353667619.00			

4.2 Uraian Kegiatan

Dokumen Rencana Strategis DISPORAPAR Kota Pontianak Tahun 2025-2029 merupakan pedoman strategis dan operasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen ini dirancang untuk terintegrasi secara penuh dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak tahun 2025-2029.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra ini dirancang secara komprehensif dan terukur. Setiap rumusan merupakan penjabaran logis dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas dan relevansi terhadap isu strategis daerah serta kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap alokasi sumber daya memberikan dampak optimal terhadap pencapaian indikator kinerja utama.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Tujuan dan Sasaran strategis tersebut, rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan DISPORAPAR Kota Pontianak tahun 2025-2029 yang disajikan secara rinci dalam Tabel 4.2. berikut ini :

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA DISPORAPAR
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KET (08)
2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA							
- Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pemuda - Meningkatkan Produktivitas Ekonomi	Meningkatkan Kapasitas Pemuda dan Atlet Berprestasi serta Meningkatkan Pertumbuhan Sektor	Meningkatkan Prestasi Atlet	Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Indeks Pembangunan Pemuda (Indeks)		
					Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata (%)		
					Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) (Indeks)		
					Persentase Peningkatan Jumlah Atlet Peraih Medali (%)		
					Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)		2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)		2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.19.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.19.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.19.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.19.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.19.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
			Terkelolanya administrasi Barang Milik Daerah dengan baik		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.19.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.19.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.19.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.19.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.19.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.19.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Terkelolanya administrasi pendapatan daerah kewenangan		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.19.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.19.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	(02)	SASARAN	(03)	OUTCOME	(04)	OUTPUT	(05)	INDIKATOR	(06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	(07)	KETERA NGAN	(08)
<p>in perangkat daerah dengan baik</p> <p>Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p>									<p>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)</p> <p>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</p> <p>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)</p>		<p>2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p>			
<p>Terpenuhiya Administrasi Perangkat Daerah</p>									<p>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)</p> <p>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)</p> <p>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</p> <p>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)</p> <p>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)</p> <p>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)</p> <p>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)</p> <p>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</p> <p>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)</p>		<p>2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p>2.19.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</p> <p>2.19.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</p> <p>2.19.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERA NGAN (08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.19.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERAANGAN (08)
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.19.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.19.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.19.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Meningkatnya jumlah Cabor yang menjuarai Event tingkat Kab/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional			Persentase Peningkatan Atlet berprestasi (%)	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
			Terselenggara kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat kabupaten/Kota (Kegiatan)	2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
				Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.03.2.02.0006 - keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
			Tertaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olaharaga Prestasi Tingkat daerah Provinsi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
				Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(07)
				Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah
				Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
					KETERANGAN
					(08)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERAANGAN (08)
		Meningkatnya Kemampuan Pemuda	Terpernuhinya Layanan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
					Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	2.19.03.2.05.0009 - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	
					Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
					Persentase Pemuda yang Mengikuti Pelatihan dan Keterampilan/Keahlian (%)		
					Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					<p>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)</p> <p>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</p> <p>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</p> <p>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</p> <p>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</p> <p>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</p> <p>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)</p> <p>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</p> <p>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</p> <p>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)</p> <p>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)</p>	<p>2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p> <p>2.19.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</p> <p>2.19.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>2.19.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	
				<p>Terselenggara Administrasi Keuangan</p>			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	Perangkat Daerah OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERAANGAN (08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.19.01.2.02.0001 - Penyiediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.19.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terkelolanya administrasi Barang Milik Daerah dengan baik	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.19.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.19.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.19.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RP/JMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERA NGAN (08)
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.19.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.19.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.19.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terkelolanya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah dengan baik	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.19.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.19.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.19.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.19.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

				Terpenuhi ya Administra si Umum Perangkat Daerah	<p>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)</p> <p>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)</p> <p>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)</p> <p>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)</p> <p>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</p> <p>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)</p>	<p>2.19.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</p> <p>2.19.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERA NGAN (08)
					<p>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</p> <p>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</p> <p>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</p> <p>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)</p> <p>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</p> <p>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</p>	<p>2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>2.19.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p>	

					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.19.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.19.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.19.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Tertaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.19.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.19.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Meningkatnya Jumlah Organisasi Kepemudaan yang berpartisipasi dan aktif dalam event kepemudaan secara berjenjang		Rasio Wirausaha Pemuda (%)	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
		Tertaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RP/JMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERA NGAN (08)
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten /Kota					<p>Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)</p> <p>Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)</p> <p>Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)</p> <p>Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)</p> <p>Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)</p>	<p>2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</p> <p>2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</p> <p>2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</p> <p>2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota</p> <p>2.19.02.2.01.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda</p> <p>2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota</p>	

					<p>Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)</p>	<p>2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota</p>	
				<p>Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)</p>	<p>2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERAANGAN (08)
			<p>Meningkatnya Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina setiap Tahun</p>		<p>Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)</p>	<p>2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten/kota</p>	
			<p>Meningkatnya Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina setiap Tahun</p>		<p>Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam kepramukaan (%)</p>	<p>2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</p>	
				<p>Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</p>	<p>Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)</p>	<p>2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</p>	
					<p>Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)</p>	<p>2.19.04.2.01.0005 - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah</p>	
		<p>Meningkatnya Lama Tinggal wisatawan dan Kapasitas</p>			<p>Tingkat kunjungan wisatawan (%)</p>		
			<p>Terpenuhi Layanan Administrasi</p>		<p>Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)</p>	<p>2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.19.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.19.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terselenggaraanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.19.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.19.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERA NGAN (08)
				<p>Terkelolanya administrasi Barang Milik Daerah dengan baik</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</p> <p>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</p> <p>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</p> <p>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</p> <p>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</p> <p>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)</p> <p>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)</p>	<p>2.19.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>2.19.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>2.19.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>2.19.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah</p> <p>2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p>	
				<p>Terkelolanya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah dengan baik</p> <p>Terkelolanya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p>	<p>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)</p> <p>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</p> <p>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)</p> <p>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)</p>	<p>2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p>	

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.19.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.19.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.19.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.19.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Terpenuhi ya Administrasi Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.19.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERA NGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				<p>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)</p> <p>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)</p> <p>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</p> <p>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)</p> <p>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</p> <p>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)</p> <p>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</p> <p>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</p> <p>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</p> <p>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</p> <p>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</p> <p>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</p> <p>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</p>	<p>2.19.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</p> <p>2.19.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>2.19.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>2.19.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>2.19.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</p> <p>2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</p> <p>2.19.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>2.19.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETETERANGAN (08)
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.19.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.19.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Meningkatnya Jumlah Destinasi wisata yang tingkatan sarprasnya serta pembinaan terhadap pelaku usaha wisata di Kota Pontianak				Persentase Destinasi Wisata dengan Kondisi Baik (%)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETETERANGAN (08)
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.2.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengelolaan Destinasi wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya jumlah kunjungan dan lama tinggal Wisatawan Nusanantara dan Mancanegara				Jumlah Kunjungan Wisatawan (%)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
				Terlaksananya Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Uraian Sub Kegiatan DISPORAPAR Kota Pontianak untuk tahun 2025-2029 secara komprehensif dilengkapi dengan rincian kinerja, indikator, target dan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Setiap Sub Kegiatan dirumuskan sebagai langkah konkret dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis DISPORAPAR Kota Pontianak yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kota Pontianak yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029.

Untuk memastikan akuntabilitas dan pengukuran keberhasilan setiap Sub Kegiatan akan diukur berdasarkan :

- Kinerja menggambarkan output atau hasil langsung yang diharapkan dari pelaksanaan sub kegiatan. Kinerja ini akan menjadi tolok ukur capaian operasional Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak.
- Indikator merupakan alat ukur kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian kinerja. Indikator dirancang agar spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).
- Target menetapkan besaran capaian yang diharapkan untuk setiap indikator pada setiap tahun anggaran dalam periode Renstra 2025-2029. Target ini bersifat progresif dan realistis, disesuaikan dengan kapasitas dan sumber daya yang tersedia serta memperhatikan dinamika lingkungan strategis.
- Pagu Indikatif menunjukkan estimasi kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan setiap sub kegiatan pada setiap tahunnya. Pagu indikatif ini akan menjadi dasar perencanaan penganggaran yang lebih detail pada tahap penyusunan Rencana Kerja tahunan.

Rencana Strategis DISPORAPAR Kota Pontianak untuk tahun 2025-2029 diuraikan melalui hirarki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lengkap dengan proyeksi Pendanaan yang dibutuhkan. Penyusunan ini merupakan manifestasi konkret dari komitmen DISPORAPAR Kota Pontianak dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029. Berikut ini penjabaran komprehensif mengenai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta proyeksi pendanaan disajikan dalam bentuk tabel 4.3 berikut ini.

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

BIDANG / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKA TOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		PAGU	PAGU		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				21.132.933.250		16.670.611.000		15.633.200.900		16.070.163.250		16.578.667.619				
Terperuhnya Layanan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	9.037.495.084		8.886.352.934		8.708.942.834		8.837.905.184		8.944.409.553				
2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				54.500.000		64.500.000		54.500.000		65.500.000		65.500.000		2.19.3.26.0.00.02.00.00 - Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata		
Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		5	5	54.500.000		64.500.000		54.500.000		65.500.000		65.500.000				
		5	5	3 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen				
		5	5	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen				

2.19.01.2.0 1.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.500.000	12.500.000	12.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						PERANGKAT DAERAH	KETA TERA NG AN				
								2026		2027		2028				2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIA TAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTCOM E / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000				
2.19.01.2.0 1.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan															5.000.000	5.000.000	5.000.000		

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6
2.19.01.2.0 1.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	18.500.000	5	18.500.000	5	18.500.000	5	18.500.000	5	18.500.000	5	18.500.000	5	18.500.000	5	18.500.000	5	18.500.000	5
2.19.01.2.0 1.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen			0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Keuangan SKPD	2.19.01.2.0 2.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan n Akuntansi SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						PERANGKAT DAERAH	KE TE RA NG AN				
							2026		2027		2028				2029		2030	
							TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)			TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)
INDIKA TOR OUTCOM E / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024																	
Terlaksan nya Koordinasi dan Pelaksanaan n Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan n Akuntansi SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000					
2.19.01.2.0 2.0007 - Koordinasi dan Penyusunan n Laporan Keuangan/ Bulanan/ Triwulanan / Semester n SKPD			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000					

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	48 Laporan	10.000.000	48 Laporan	10.000.000	48 Laporan	10.000.000	48 Laporan	10.000.000	48 Laporan	10.000.000	10.000.000	48 Laporan	10.000.000	10.000.000
2.19.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah Peringkat Daerah		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	37.000.000		35.000.000	37.000.000
Terkelolanya administrasi Barang Milik Daerah dengan baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	3.000.000		
2.19.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		46.000.000	46.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Orang	6 Orang	36.000.000	6 Orang	36.000.000	6 Orang	36.000.000	6 Orang	36.000.000	6 Orang	46.000.000	6 Orang	46.000.000	46.000.000		
2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			646.741.834		562.921.934		666.741.834		710.420.184		732.741.834		732.741.834	732.741.834		
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	15	15	646.741.834	15	562.921.934	15	666.741.834	15	710.420.184	15	732.741.834	15	732.741.834	732.741.834		
	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen				
Jumlah Dokumen Monitoring & Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	3.000.000		
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6 Orang	6 Orang	36.000.000	6 Orang	36.000.000	6 Orang	36.000.000	6 Orang	36.000.000	6 Orang	46.000.000	6 Orang	46.000.000	46.000.000		
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Laporan) SKPD	15	15	646.741.834	15	562.921.934	15	666.741.834	15	710.420.184	15	732.741.834	15	732.741.834	732.741.834		
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen				

erangan Bangunan Kantor	INDIKATOR OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETAHANAN
			2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pen Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disedia kan (Paket)	1 Paket	1 Paket	9.626.010	1 Paket	9.626.010	1 Paket	9.626.010	1 Paket	9.626.010	1 Paket	9.626.010	1 Paket	9.626.010		
2.19.01.2.0 6.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perengkap an Kantor				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		40.000.000		50.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perangka pan Kantor yang Disedia kan (Paket)	4 Paket	4 Paket	25.000.000	4 Paket	25.000.000	4 Paket	25.000.000	4 Paket	25.000.000	4 Paket	40.000.000	4 Paket	50.000.000		
2.19.01.2.0 6.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				60.000.000		60.000.000		80.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	6 Paket	60.000.000	6 Paket	60.000.000	80.000.000	6 Paket	100.000.000	6 Paket	100.000.000	100.000.000	6 Paket	100.000.000	
2.19.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		150.000.000		150.000.000	150.000.000		150.000.000		150.000.000	150.000.000		150.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3 Paket	150.000.000	3 Paket	150.000.000	150.000.000	3 Paket	150.000.000	3 Paket	150.000.000	150.000.000	3 Paket	150.000.000	
2.19.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		150.000.000		150.000.000	150.000.000		150.000.000		153.678.350	150.000.000		150.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	150.000.000	2 Paket	150.000.000	150.000.000	2 Paket	150.000.000	2 Paket	153.678.350	150.000.000	2 Paket	150.000.000	
2.19.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3 Dokumen	3.000.000	

Pemerintah Daerah		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE TE				
		INDIKATOR	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
		5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
		5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.315.260.000	1.291.600.000	1.291.600.000	1.291.600.000	1.291.600.000	1.291.600.000	1.291.600.000	1.291.600.000	1.291.600.000	1.291.600.000	1.291.600.000	1.291.600.000	1.291.600.000	1.291.600.000	1.291.600.000	1.291.600.000
		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000
		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000	1.304.600.000
		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIA TAN OUTPUT	OUTCOM E / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		RA NG AN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	(02)	(03)											
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
2.19.01.2.0 8.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.000.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
Terlaksana ny Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
2.19.01.2.0 8.0002 - Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik			100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
Tersediany a Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	

2.19.01.2.0 8.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.211.260.000	1.187.600.000	1.187.600.000	1.187.600.000	1.200.600.000		
Tersediany a Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Discedlaka n (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
2.19.01.2.0 9 - Pemeliharaan an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah			141.580.000	144.580.000	144.580.000	144.580.000	169.530.719		
Terlaksana nya Pemeliharaan an Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah Kendaraan n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarka n Pejakt n dan Perzinann ya (Unit)	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	41 Unit	41 Unit	41 Unit	41 Unit	41 Unit	41 Unit	41 Unit	41 Unit
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabili tasi (Unit)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

BIDANG / URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		PAGU	PAGU		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.19.02.2.01 - Penyadara n, Pemberday aan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemuda an Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota, Wirasaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten /Kota				400.000.000		320.000.000		420.000.000		540.000.000		580.000.000				
Terlaksananya Penyadara n, Pemberday aan, dan Pengembangan Pemuda yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten /kota yang haknya terpenuhi (Orang)	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang			
Terhadap Kepemuda an		10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang			

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi i Penuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	400 orang	200.000.000	400 orang	165.000.000	400 orang	200.000.000	400 orang	300.000.000	400 orang	300.000.000	300.000.000	
2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengambanan Kepeloporan Pemuda bagi Pelopor Tingkat Kabupaten/kota		60.000.000		55.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	80.000.000	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengambanan Kepeloporan Pemuda bagi Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	10 orang	60.000.000	10 orang	55.000.000	10 orang	80.000.000	10 orang	80.000.000	10 orang	80.000.000	80.000.000	
2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengambanan		711.388.266		711.388.266		711.388.266		711.388.266		711.388.266	811.388.266	

Organisasi Kepemuda an Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	INDIKA TOR OUTCOM E / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KE TE RA NG AN	
			2026		2027		2028		2029		2030		PAGU	TARGET			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)					TARGET (14)
Terlaksana nya Pemberday aan dan Pengemban gan Organisasi Kepemuda an Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Organisasi Kepramuk aan Tingkat Daerah yang Meningkat kapasitas nya (Organisas i)	25 organisasi	711.388.266	25 organisasi	711.388.266	25 organisasi	711.388.266	25 organisasi	711.388.266	25 organisasi	731.388.266	25 organisasi	731.388.266	25 organisasi	811.388.266		(15)
2.19.02.2.0 2.0003 - Koordinasi, sinkronisas i, dan penyelengg aran pengemban gan organisasi kepemudaa n tingkat kabupaten /kota			711.388.266		711.388.266		711.388.266		711.388.266		731.388.266		731.388.266		811.388.266		
Meningkat nya Kapasitas Organisasi Kepramuka	Jumlah Organisasi Kepramuk aan Tingkat Daerah yang	25 organisasi	711.388.266	25 organisasi	711.388.266	25 organisasi	711.388.266	25 organisasi	711.388.266	25 organisasi	731.388.266	25 organisasi	731.388.266	25 organisasi	811.388.266		

an Tingkat Daerah	Daerah (Laporan)	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		PAGU			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	(03)	TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		(14)	(15)	
(01)																
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			1.620.000.000	1.505.000.000	1.688.890.100	1.775.000.000	1.775.000.000					1.775.000.000				
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			525.000.000	355.000.000	455.000.000	455.000.000						455.000.000				
Meningkatnya Jumlah Destinasi wisata yang tingkatan sarprasnya serta pembinaan terhadap pelaku	Persentase Destinasi Wisata dengan Kondisi Baik (%)	15	16	525.000.000	16,5	355.000.000	17	455.000.000	18	455.000.000	18,5	455.000.000		2.19.3.26.0.00.02.000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		

usaha wisata di Kota Pontianak	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemanfaatan, Revitalisasi) (Lokasi)	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitorin g dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan /Pemeliharaan/Rehabilitasi
	450.000.000	2 Lokasi	200 orang	6	150.000.000
	255.000.000	2 Lokasi	200 orang	6	50.000.000
	355.000.000	2 Lokasi	200 orang	6	100.000.000
	355.000.000	2 Lokasi	200 orang	6	100.000.000
	355.000.000	2 Lokasi	200 orang	6	100.000.000
	355.000.000	2 Lokasi	200 orang	6	100.000.000
	355.000.000	2 Lokasi	200 orang	6	100.000.000
	355.000.000	2 Lokasi	200 orang	6	100.000.000
	355.000.000	2 Lokasi	200 orang	6	100.000.000

Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	2 Lokasi	150.000.000	2 Lokasi	50.000.000	2 Lokasi	50.000.000	2 Lokasi	100.000.000	2 Lokasi	100.000.000	2 Lokasi	100.000.000	2 Lokasi	100.000.000			
3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			50.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000			
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	6	50.000.000	6	55.000.000	6	55.000.000	6	55.000.000	6	55.000.000	6	55.000.000	6	55.000.000			

3.26.02.2.0 1.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten /Kota			200 orang	250.000.000	200 orang	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200 orang	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten /Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang dikembalikan (Orang)	200 orang	200 orang	250.000.000	200 orang	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200 orang	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
3.26.02.2.0 3 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota				75.000.000		100.000.000	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000	100.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Destinasi wisata Kabupaten /Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /kota yang tersedia dan terpelihara (Unit)	6 Unit	6 Unit	75.000.000	6 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	6 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	6 Unit 1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota (Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen				1 Dokumen				1 Dokumen

Kabupaten / Kota	Terpilih a (Unit)																	
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATAN		500.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000		
Meningkatnya Jumlah Kunjungan dan lama tinggal wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kota Pontianak	Jumlah Kunjungan Wisatawan (%)	35.200	35.500	35.750	36.000	36.000	36.300											
3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota		500.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000		
Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		

2.19.3.26.0.00.02.00
00 - DINAS
KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	2	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			115.000.000		110.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		
Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif yang bersertifikat HKI	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat HKI (%)	23	30	32	110.000.000	35	130.000.000	40	130.000.000	42	130.000.000		130.000.000	2.19.3.26.0.00.02.00 00 - DINAS KEFEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3.26.04.2.0 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (kegiatan)	1	1	1	115.000.000	110.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000		
Terlaksananya Penguatan Ekonomi Kreatif	INDIKATOR	1	1	1	115.000.000	110.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000		PERANGKAT DAERAH
	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETE

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIA TAN OUTPUT	OUTCOM E / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		RA NG AN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	(02)		15 Produk		15 Produk		15 Produk		15 Produk		15 Produk		
3.26.04.2.0 2.0014 - Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual Terlaksana				65.000.000		50.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	
			1	65.000.000	1	50.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	

n Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	100 Orang	480.000.000	100 Orang	490.000.000	553.890.100	100 Orang	590.000.000	100 Orang	590.000.000	4 Laporan	440.000.000	440.000.000	4 Laporan	440.000.000
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	100 Orang	480.000.000	4 Laporan	490.000.000	553.890.100	100 Orang	590.000.000	100 Orang	590.000.000	4 Laporan	440.000.000	440.000.000	4 Laporan	440.000.000
3.26.05.2.01.0005 - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	100 Orang	480.000.000	4 Laporan	490.000.000	553.890.100	100 Orang	590.000.000	100 Orang	590.000.000	4 Laporan	440.000.000	440.000.000	4 Laporan	440.000.000
Tertfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan	100 Orang	480.000.000	4 Laporan	490.000.000	553.890.100	100 Orang	590.000.000	100 Orang	590.000.000	4 Laporan	440.000.000	440.000.000	4 Laporan	440.000.000

Konservasi Ekonomi Kreatif	dan Konservas i Ekonomi Kreatif (Laporan)														
3.26.05.2.0 1.0006 - Fasilitasi Pengemban gan Kompetens i Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		130.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000		
Terfasilitasi nya Pengemban gan Kompetens i Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengemban gan Kompeten si Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	150.000.000		

DISPORAPAR Kota Pontianak merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Dengan demikian, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak memiliki kewajiban dalam melaksanakan kinerja pelayanan di urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Uraian Sub Kegiatan merupakan penjabaran operasional dari program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak. Bagian ini menerjemahkan program prioritas pembangunan daerah menjadi aksi-aksi nyata yang spesifik, terukur dan memiliki target yang jelas. Rincian ini berfungsi sebagai landasan utama dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja untuk memastikan setiap kontribusi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata efektif dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Pontianak tahun 2025-2029. Berikut Daftar Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak yang disajikan dalam Tabel 4.4 dibawah ini :

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				
1,	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Jumlah Organisasi Kepemudaan yang berpartisipasi dan aktif dalam event kepemudaan secara berjenjang	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
			2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
			2.19.02.2.01.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	
			2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	
			2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	

			<p>2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota</p>	
<p>2, 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</p>		<p>Meningkatnya Jumlah Cabor yang menjuarai Event tingkat Kab/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional</p>	<p>2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga</p> <p>2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah</p> <p>2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota</p> <p>2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</p>	

			<p>2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait</p> <p>2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</p> <p>2.19.03.2.05.0009 - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan</p> <p>2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional</p>	
3,	2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina setiap Tahun	<p>2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</p> <p>2.19.04.2.01.0005 - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah</p>	
4,	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Jumlah Destinasi wisata yang tingkatan sarprasnya serta pembinaan terhadap pelaku usaha wisata di Kota Pontianak	<p>3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</p> <p>3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota</p>	

			3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
5,	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Jumlah Kunjungan dan lama tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kota Pontianak	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.03.2.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	

			<p>3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</p>
6,	<p>3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</p>	<p>Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif yang bersertifikat HKI</p>	<p>3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA</p>
			<p>3.26.04.2.02.0014 - Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual</p>
			<p>3.26.04.2.02.0022 - Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual</p>
7,	<p>3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</p>	<p>Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif Yang dilatih</p>	<p>3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</p>
			<p>3.26.05.2.01.0005 - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif</p>
			<p>3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</p>

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pontianak tahun 2025-2029 merupakan indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang secara langsung akan dicapai DISPORAPAR Kota Pontianak dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD sesuai pada tabel 4.5.

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK										
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)		(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA									
2	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	-	55	55,5 5	56	56,7 5	57	57,85	
3	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	%	3,18	3,2	3,25	3,34	3,48	3,5	3,65	
4	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	-	0,3	0,32	0,325	0,33	0,335	0,34	
5	Persentase Pemuda yang Mengikuti Pelatihan dan Keterampilan/Keahlian	%	-	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	

6	Tingkat kunjungan wisatawan	%	16,5	20	22	24	25	28	30
---	-----------------------------	---	------	----	----	----	----	----	----

4.6 Target Keberhasilan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pontianak tahun 2025-2029 merupakan indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja kunci yang akan menjadi indikator pencapaian Tujuan dan Sasaran DISPORAPAR Kota Pontianak dalam 5(lima) tahun mendatang sebagai komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai pada tabel 4.6 berikut :

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK											
NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					KET	
					2025	2026	2027	2028	2029		2030
(01)	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1,	Peningkatan prestasi olahraga	positif	%	43	43,5	43,8	44,2	44,8	45	45,6	
2,	Tingkat partisipasi kasar pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	positif	%	2,2	2,5	2,8	3	3,5	3,7	3,9	
4,	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan	positif	%	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,3	3,7	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) DISPORAPAR Kota Pontianak Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Renstra Kota Pontianak Tahun 2025 - 2029, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DISPORAPAR Kota Pontianak.

Berhasilnya pencapaian visi dan misi tersebut tergantung dari peran aktif, sikap mental, tekad, semangat, disiplin serta ketaatan aparat DISPORAPAR Kota Pontianak terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan dukungan stakeholder yang lain. Berdasarkan hal tersebut diharapkan Rencana Strategis (Renstra) ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman secara sungguh-sungguh dalam penyusunan program/kegiatan tahunan oleh aparat DISPORAPAR Kota Pontianak, sehingga secara bertahap keinginan yang telah tertuang dalam visi dan misi dapat tercapai secara optimal. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra Perubahan diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di lingkungan eksternal maupun internal DISPORAPAR Kota Pontianak. Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,

WALI KOTA PONTIANAK,




EDI RUSDI KAMTONO